

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Program Keluarga Berencana (KB) berfokus pada pasangan usia subur, adalah program pengendalian penduduk yang signifikan berdasarkan pengendalian kelahiran. Keluarga berencana juga merupakan metode pencegahan kematian anak dan ibu yang berhasil karena membantu pasangan suami istri dalam menghindari risiko kehamilan yang tinggi dan penurunan risiko kematian seorang ibu melalui penundaan dan mencegah dari jarak dan umur kehamilan (BKKBN, 2019). Program KB terdiri dari tindakan promotif dan preventif yang terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyuluhan dan penggunaan alat kontrasepsi ialah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan tidak jangka panjang (non MKJP) termasuk contoh pelayanan promotif dan preventif (Yuliani et al., 2022).

Kelompok MKJP mencakup metode kontrasepsi seperti implan (susuk), MOW (Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria) dan *Intra Uterine Device* (IUD) tetapi tidak termasuk seperti kondom, suntik, dan pil. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) saat ini digunakan sebagai akibat dari program Keluarga Berencana Pemerintah (Azis et al., 2021). Kontrasepsi jangka panjang, sering dikenal sebagai MKJP, adalah metode pengendalian kelahiran yang dapat digunakan untuk mencegah kelahiran yang berlangsung lebih dari tiga tahun dengan menunda, jarak kehamilan, dan menghentikan kesuburan dalam jangka waktu yang lama hingga mengakhiri kehamilan jika tidak ingin memiliki anak lagi (Pratiwi, 2021).

Populasi terus meningkat sekarang di seluruh planet ini. Sekitar 6,5 miliar orang hidup di planet ini pada tahun 2005. Pada tahun 2020, jumlahnya diperkirakan akan mencapai 7,8 miliar. Dengan populasi sekitar 1,3 miliar, Cina adalah negara terpadat di dunia. India berada di urutan kedua dengan 1,2 miliar orang, sedangkan Indonesia di peringkat keempat dengan 249 juta orang. Dengan 34 provinsi dan jumlah penduduk 270.000.000 jiwa, terbagi rata antara 133.000.056 perempuan dan 136.000.066 laki-laki. Indonesia merupakan negara berkembang dengan luas daratan 1.916.826,2 km<sup>2</sup> (Pratiwi, 2021)

*World Health Organization* (WHO) tahun 2020, mengatakan dari 900 juta pada tahun 2001, terjadi peningkatan jumlah wanita yang cukup besar dalam keinginan menggunakan keluarga berencana di antara 1,9 kategori wanita secara global yang berada pada usia reproduksi (15-49 tahun) menjadi sekitar 1,1 miliar pada tahun 2000. Akibatnya, tingkat prevalensi kontrasepsi meningkat dari 47,7% menjadi 49,0%, dan jumlah wanita yang menggunakan metode kontrasepsi meningkat dari 663 juta menjadi 851 juta. Pada tahun 2030, kemungkinan akan ada tambahan sebesar 70 juta wanita di dunia. Persentase wanita usia subur yang kebutuhan KB nya terpenuhi dengan alat kontrasepsi kontemporer telah meningkat secara progresif selama beberapa dekade terakhir, meningkat dari 73,6% pada tahun 2000 menjadi 76,8% pada tahun 2020 (Indikator SDG 3.7.1) (WHO, 2020).

Menurut informasi dari Profil Keluarga Indonesia, 67,6% pasangan dengan PUS (orang usia subur) berpartisipasi aktif dalam keluarga berencana pada tahun 2020. Jumlah ini naik 63,31% dari 2019 hingga saat ini. Menurut tren akseptor memilih metode kontrasepsi pada tahun 2020, teknik suntik dipilih oleh 72,9% di antaranya, diikuti oleh pil sebesar 19,4%. Kedua jenis alat kontrasepsi ini kurang

berhasil mencegah pembuahan dibandingkan bentuk kontrasepsi lainnya karena merupakan teknik kontrasepsi jangka pendek. Setiap tahun, kecenderungan ini terlihat, karena banyak orang menggunakan teknik kontrasepsi jangka pendek daripada jangka panjang (MOP, implan, IUD dan MOW) (Profile Kesehatan Indonesia, 2020).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, sebesar 14,66% wanita MKJP usia 10-54 tahun di Indonesia menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan, dibandingkan dengan 58,1% wanita non-MKJP dan 27,1% wanita yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa karena kesadaran masyarakat akan MKJP dan kekhawatiran akan efek samping MKJP, sehingga masyarakat masih menggunakan kontrasepsi non-MKJP (Riskesdas, 2018)

Menurut BKKBN, PUS terlibat dalam KB aktif pada tingkat 62,5% pada 2019, turun dari 63,27% pada 2018. Sedangkan 66% adalah target RPJMN untuk penyelesaian 2019. Statistik SDKI 2017 juga mengungkapkan persentase yang lebih besar untuk keluarga berencana aktif, yaitu 63,6%. Bengkulu memiliki tingkat KB aktif terbesar (71,4%), sedangkan Papua Barat memiliki angka terendah (25,4%). Sebanyak 11 (sebelas) provinsi, antara lain Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara memiliki cakupan KB aktif yang memenuhi tujuan RPJMN sebesar 66% (Kemenkes RI, 2019).

Menurut informasi dari BKKBN Provinsi Sumut dan Profil Kesehatan Sumut, pada tahun 2019 terdapat 2.259.714 PUS—dari jumlah tersebut, 1.572.121 (69,57%) berpartisipasi aktif dalam KB. Di antara mereka yang berpartisipasi dalam keluarga berencana, implan digunakan oleh 16,16% peserta, IUD 8,99%,

teknik operasi pria (MOP) 0,79%, dan metode operasi wanita 7,11%. Suntikan, tablet, dan kondom merupakan 31,72%, 27,36%, dan 7,87% peserta KB non-MKJP (Profile Provsu, 2019) .

Menurut Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2020 akan ada 302.063 pasangan usia subur, dan 210.377 pasangan atau 69,6% akan aktif memanfaatkan KB. Suntikan yaitu alat kontrasepsi banyak digunakan oleh peserta KB aktif, disusul tablet (26,8%). Metode Operasi Pria (MOP), yang menyumbang 1,2% dari semua metode, adalah yang paling tidak umum. Puskesmas Kota Glugur memiliki cakupan penggunaan MKJP terendah sebesar 1.111, disusul oleh Puskesmas Bestari sebanyak 1.138, dan Puskesmas Sei Agul sebesar 3.142, menurut statistik penggunaan MKJP KB di Dinas Kesehatan Kota Medan (Dinkes Kota Medan, 2020).

Sektor kependudukan adalah bidang utama yang menjadi perhatian Indonesia. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk membuat semua orang di komunitas tetap sehat dan bahagia. Untuk memperlambat laju pertumbuhan, pemerintah terus melaksanakan program Keluarga Berencana. Salah satu tujuannya yaitu untuk mencegah kehamilan melalui teknik kontrasepsi dan, melalui inisiatif perencanaan dan pengendalian populasi, untuk mendorong kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat. Saat ini, masih ada peningkatan populasi di seluruh dunia (Azis et al., 2021).

Karena kesadaran masyarakat yang rendah akan manfaat metode MKJP, kelangkaan tenaga kerja yang memenuhi syarat, dan kurangnya fasilitas, penerapan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih relatif rendah. Pemerintah wajib memastikan bahwa pelayanan dan informasi KB dapat diakses, disertai

informasi kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan Keluarga Berencana bertujuan mengendalikan kehamilan bagi pasangan usia subur guna menciptakan generasi masa depan yang berpendidikan (Dinkes Kota Medan, 2020).

Menurut penelitian M. arif (2020) dari 87 responden, 39,1% menggunakan KB MKJP sedangkan 60,9% tidak. Suami yang mendukung berkaitan dengan manfaat KB MKJP di wilayah kerja Puskesmas Mandala. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Puskesmas Mandala dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang kontrasepsi MKJP kepada pasangan suami istri, wanita yang sedang menggunakannya, dan wanita yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya (M.arif, 2020).

Usia, jumlah anak, persepsi, dan dukungan suami merupakan faktor penentu. Menurut penelitian Uzma dan Dewi, faktor diatas berpengaruh terhadap keputusan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Sikap petugas kesehatan merupakan faktor penunjang lebih lanjut yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan KB jenis MKJP. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebanding dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan sebagian besar masyarakat menjelaskan bahwa tenaga kesehatan MKJP melayani, menjelaskan dengan ramah, tetapi masih belum menggunakan layanan KB. MKJP disebabkan oleh ketakutan pengguna untuk menjalani operasi atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh mereka (Pratiwi, 2021).

Survei pendahuluan di wilayah Kerja Puskesmas Glugur Kota Medan, terdapat jumlah pasangan usia subur di tahun 2021 sebesar 2.682 PUS dengan

peserta KB aktif sebanyak 1.172 (43,3%). Selain itu, diketahui persentase peserta KB berdasarkan metode kontrasepsi non-MKJP yaitu kondom sebanyak 86 (7,4%) suntik sebanyak 526 (45%) pil KB sebanyak 237 (20,3%) sedangkan persentase penggunaan metode kontrasepsi MKJP yaitu diantaranya AKDR sebanyak 105 (9,0%) dan implan sebanyak 208 (17,9%) dan KB dengan MOW/MOP sama sekali tidak ada. Mengacu pada data tersebut dapat diyakini bahwa penggunaan KB belum begitu diminati oleh PUS di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan, khususnya dengan rendahnya penggunaan KB metode MKJP ini. Bahkan salah satu metode MKJP yaitu MOP dan MOW, sama sekali tidak terdapat pasangan usia subur yang mempergunakannya.

Hasil survei pendahuluan juga menemukan bahwa PUS mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dengan rata-rata usia di bawah 30 tahun, dominan menggunakan jenis KB non-MKJP, dengan persentase tertinggi menggunakan KB suntik. Hal ini berdasarkan pernyataan beberapa wanita pekerja di wilayah kerja Puskesmas Kota Glugur menerangkan bahwa mereka tidak begitu memahami metode kontrasepsi selain kontrasepsi suntik, pil dan kondom karena kurangnya informasi dari berbagai media. Selain jarang mengunjungi fasilitas kesehatan, PUS juga mengaku belum mendapat izin dari suami untuk menggunakan kontrasepsi MKJP. Mereka masih memiliki target jumlah anak yang akan dibina. Mereka masih memiliki bilangan target jumlah anak yang akan diusahakan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji lebih dalam dengan judul “Determinan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah Kerja Puskesmas Glugur Kota Medan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dikembangkan pertanyaan dalam penelitian: “Variabel apa saja yang mempunyai hubungan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui Determinan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kabupaten Kota Medan .

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui hubungan Umur terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
2. Mengetahui hubungan Pengetahuan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
3. Mengetahui hubungan Sikap terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
4. Mengetahui hubungan Pendidikan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
5. Mengetahui hubungan Status Pekerjaan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
6. Mengetahui hubungan Jumlah Anak terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.

7. Mengetahui hubungan Sumber Informasi dari media cetak kesehatan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
8. Mengetahui hubungan Dukungan Suami terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.
9. Mengetahui hubungan peran petugas kesehatan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Penelitian bagi Dinas Kesehatan**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk bahan masukan serta informasi kepada Dinas Kesehatan Kota Medan dalam program peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya pada wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian diharapkan sebagai sumber informasi untuk masyarakat terhadap informasi maupun edukasi terkait penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat bidang penggunaan KB MKJP pada wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.

##### **1.4.3 Manfaat Penelitian Bagi Puskesmas**

Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan serta sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam merencanakan program peningkatan



penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya pada wilayah kerja Puskesmas Glugur Kota Medan.

